

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terus melakukan perubahan dalam pembangunan nasionalnya hingga saat ini. Pembangunan tersebut meliputi bidang-bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan peningkatan pembangunan indeks manusia. Pembangunan dalam artian yang singkat adalah upaya untuk melakukan perubahan pada berbagai aspek kehidupan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Terdapat banyak faktor yang dapat mendukung pembangunan di suatu negara termasuk di Indonesia. Peran suatu organisasi internasional merupakan salah satu faktor tersebut.

Organisasi Internasional memiliki peran sangat penting dalam mendorong, inovasi, partisipasi dan good governance terutama di Indonesia. Organisasi Internasional antara lain lembaga keuangan dan donor, lembaga internasional dibawah United Nations (UN), NGO internasional, dan institusi internasional lain seperti internasional city county management association (ICMA).

Good governance diakui lembaga donor merupakan aspek penting menuju pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, oleh sebab itu berbagai kegiatan pembangunan kapasitas negaranegara penerima bantuan untuk memperbaiki kualitas governance, merupakan bagian penting dari hampir semua program lembaga donor.

Kata *governance* berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.(Haris, 2007). Dalam salah satu laporannya yang sangat berpengaruh, Bank Dunia menyatakan bahwa pemerintah adalah sentral dalam pembangunan ekonomi sosial, tidak sebagai penyedia langsung pembangunan, tetapi sebagai partner, katalis, dan fasilitator.

Pandangan realis tentang Organisasi Internasional menekankan bahwa mereka ada untuk melakukan fungsi penting bagi negara, mereka memberikan kebaikan publik, mengumpulkan informasi, memantapkan komitmen yang kredibel, memonitor perjanjian, dan umumnya membantu negara-negara membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan tindakan kolektif dan memperkuat individu serta kesejahteraan kolektif.

Berkaitan dengan hal tersebut United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB merupakan salah satu Organisasi Internasional. Organisasi ini adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia yang berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini dibiayai oleh donor dan donor-donor ini biasanya membantu menyediakan ahli dan penasehat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan untuk negara berkembang, dengan menambah pemberian bantuan untuk negara berkembang.

Lembaga internasional seperti IMF dan UNDP, sangat memengaruhi perdebatan dalam pembangunan. Pada tahun 2000, majelis umum PBB mengadopsi Deklarasi Milenium dan Millenium Development Goals (MDGs). MDGs adalah rangkaian target ambisius untuk mereduksi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan mortalitas anak, dan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang lebih baik di negara-negara berkembang. (Jackson & Sorensen, 2014).

UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). Organisasi ini dilihat sebagai organisasi yang melakukan tugas pokok PBB selain perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia. Seperti yang disebutkan di atas bahwa sumber dana yang didapatkan organisasi ini adalah dari beberapa Negara besar di dunia. Negara donor terbesar ialah Amerika Serikat, menyumbang \$ 243 juta, diikuti oleh Britania Raya, yang menyumbang \$ 233 juta kepada UNDP. Jepang, Belanda, Norwegia dan Swedia menyumbang lebih dari \$ 100 juta. Sementara, Uni Eropa menyumbang lebih dari \$921 juta (\$ 226 juta berasal dari Komisi Eropa dan sisanya berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa). UNDP mempunyai anggota lebih kurang 166 negara dari seluruh dunia, bekerja dengan bantuan pemerintah dan LSM lokal sedangkan fungsi umum dari UNDP, antara lain:

1. Mewujudkan demokrasi dalam suatu negara
2. Penanggulangan kemiskinan

3. Membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan
4. Perluasan Energi dan Keseimbangan Lingkungan
5. Penanggulangan HIV/AIDS

UNDP Sebagai sebuah organisasi internasional dan sebagai bagian dari jaringan PBB memiliki peranan yang sangat penting bagi negara - negara anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya mereka dalam membantu setiap negara yang masih ketinggalan dalam mewujudkan MDGs baik di tingkat nasional maupun global. MDGs adalah kesepakatan para pemimpin dunia pada tahun 2000 dan ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015.

Inti dari deklarasi millennium ini adalah 8 tujuan pembangunan millennium. Jika tujuan MDGs ini tercapai, kemiskinan dunia akan terpankas, dan miliaran orang akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi global. Dalam pelaksanaan upaya pencapaian MDGs, UNDP mengalami beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi diantaranya masih ada beberapa negara di dunia khususnya negara miskin dan berkembang yang tidak mengalami kemajuan signifikan dengan adanya MDGs ini.

Di Indonesia UNDP berkomitmen untuk mendukung prioritas nasional Indonesia dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Indonesia 2010-2015 dan lainnya pembangunan nasional dan daerah visi, strategi dan rencana. UNDP bekerja untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan kemiskinan,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antara kelompok dan daerah, dan membantu mencapai delapan Millennium Development Goals pada tahun 2015 di seluruh negeri.

Sebagai prestasi terbaru dari UNDP, UNDP memfasilitasi kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan 37 OMS untuk menyediakan layanan dasar, terutama bagi masyarakat terpencil, di Papua dan Papua Barat. Kemitraan ini telah mencapai 114 komunitas dan layanan tertutup termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produksi minyak kelapa, budidaya ikan, peningkatan pendidikan dini melalui sekolah-sekolah desa dan pembangunan infrastruktur dasar. UNDP juga memfasilitasi pendirian 18 pusat sumber daya masyarakat untuk memperkuat kapasitas praktisi pembangunan di tingkat desa.

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam rangkaian program UNDP di Indonesia adalah Program ART GOLD Indonesia / Srilanka. ART Gold adalah inisiatif kerjasama internasional, yang dipelopori oleh UNDP, bersama beberapa program dari badan-badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pelaku pembangunan lainnya. Program ini mempromosikan jenis baru multilateralisme dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal serta aktor-aktor sosial di Selatan dan Utara dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan proses pembangunan lokal. Pada tingkat internasional, ART mempromosikan kerjasama kemitraan jangka panjang

desentralisasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan para aktor sosial dalam masyarakat, swasta dan asosiatif Selatan dan Utara.

UNDP ART Gold Indonesia (selanjutnya AGI) dan ART Gold di Sri Lanka (selanjutnya AGSL) melalui program yang dirancang untuk membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia dan Sri Lanka. Di Indonesia daerah yang menjadi tempat pelaksanaan program ini adalah Provinsi Gorontalo dan di Sri Lanka adalah Provinsi Southern. United Nations Development Programme (UNDP) mengalokasikan dana siap pakai sebesar US\$3 juta untuk program Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan Indonesia. Selain itu juga telah disiapkan dana sebesar US\$ 6 juta yang baru tersedia jika program sudah berjalan. Program kerja sama yang akan diluncurkan di Jakarta, pada tanggal 17 tahun 2009 ini merupakan proyek perintis pertama di Asia. Dalam keterangan tertulis UNDP dijelaskan, kerja sama ini di dukungan oleh Jaringan Tematik dan Teritorial Pembangunan Manusia atau *Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématique de Développement Humain* (ART). Program ART baru dilaksanakan di dua negara yakni Indonesia dan Sri Lanka. (Mahbub, 2008).

Program UNDP AG Internasional mengadopsi sebuah metodologi untuk pembangunan lokal yang bertujuan mendukung Pemerintah dalam memperkuat peran provinsi dan sub-institusi nasional sebagai promotor pembangunan daerah. Metodologi ini didasarkan pada tiga pilar utama: Kelompok Kerja Provinsi (PWG), badan-badan pembangunan ekonomi lokal (LEDAs) dan kerjasama desentralisasi

(DC). Instrumen yang bisa diterapkan dalam perubahan kondisi yang berlainan ini sesuai dengan konteks seperti Indonesia atau Sri Lanka.

1. Kelompok kerja provinsi yang partisipatif dan program kelompok penasihat yang bertindak sebagai pemain kunci secara kolektif dan AGI adalah badan utama yang bertanggung jawab untuk perencanaan pembangunan daerah dalam filsafat ART.
2. LEDAs akan meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat sistem kompetitif lokal, dan mengintegrasikan yang belum mendapatkan keuntungan di pasar bisnis.

Membangun jaringan mitra AGI di seluruh dunia akan memudahkan mobilisasi para aktor Kerjasama Desentralisasi dan sekaligus juga pembentukan kemitraan jangka panjang antara mitra Utara dan Selatan, dan hal ini akan memungkinkan akses pada bantuan teknis dan sumber keuangan dari berbagai mitra internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :
Mengapa UNDP menjadikan provinsi Gorontalo sebagai tempat pelaksanaan program ART Gold pada tahun 2009-2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan program UNDP yang diterapkan di dua Provinsi yaitu Provinsi Gorontalo Indonesia dan Provinsi Southern di Sri Lanka.
2. Untuk mengetahui kesiapan kedua Provinsi dalam berbagai bidang pada kerjasama luar negeri yang difasilitasi oleh UNDP.
3. Untuk mengetahui manfaat dari kerjasama antar kedua Provinsi yang menjadi program dari UNDP.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kerjasama Internasional

Dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga

kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. (Adangsutri, 2010).

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokkan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua pihak yang bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri. (Klikbbm, 2010).

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional. Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial, dan kerjasama dalam bidang politik. (K.J Holsti, 1988).

2. Konsep Pembangunan

Pembangunan dimengerti sebagai pergerakan kualitatif dan kuantitatif menuju sasaran yang pantas dan dapat diraih. Pembangunan ekonomi juga seringkali didefinisikan sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Michael P. Todaro mengatakan setidaknya ada tiga komponen dasar atau tata nilai inti yang harus dipenuhi sehubungan dengan terwujudnya konsep “pembangunan”. Tiga tata nilai inti pembangunan itu adalah :

1. Nafkah hidup: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang terdiri dari kebutuhan pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.

2. Harga diri : menjadi orang, dimengerti sebagai terpenuhinya unsur pengakuan dan penghormatan.

3. Bebas dari perbudakan, konsep kebebasan di sini dimaksudkan sebagai kebebasan yang lebih mendasar atau emansipasi dari keterasingan kondisi-kondisi material dalam kehidupan dan dari perbudakan sosial, terhadap alam, kebodohan orang lain, kesengsaraan, lembaga-lembaga, dan kepercayaan yang bersifat dogmatis. (Erika, 2008).

Pengalaman di tahun-tahun 1960-an menunjukkan bahwa beberapa negara berkembang berhasil meningkatkan pertumbuhannya dalam tingkat tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Sehingga

kemudian muncul koreksi terhadap pengertian pembangunan, yaitu upaya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan tingkat pendapatan antar penduduk dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

E. Hipotesa

Dengan memahami rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Provinsi Gorontalo dipilih sebagai tempat pelaksanaan program ART Gold UNDP disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Provinsi Gorontalo memiliki komoditas unggulan di bidang pertanian.
2. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terus berkembang dalam pembangunan ekonominya.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Sehingga peneliti dapat membatasi penelitian yang akan diteliti. Peneliti mengarahkan penelitian ini pada Program UNDP pada kerjasama lur negeri yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Southern Province di Sri Lanka dalam rangka pengembangan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di kedua Provinsi. Adapun peneliti menerapkan jangkauan penggunaan data dalam penelitian ini dari tahun 2009-2013.

G. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

G.1 Data yang dibutuhkan

Masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah, Mengapa Provinsi Gorontalo melakukan kerjasama luar negeri dengan Sri Lanka dan bagaimana peluang dan tantangan dalam proses kerjasama tersebut. Dengan demikian data yang dibutuhkan dan analisa adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat dari kerjasama tersebut
- b. Data pembentukan kerjasama dan pelaksanaannya
- c. Peluang dan tantangan kerjasama

G.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti yang disebutkan di atas, maka dilakukan dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumen

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (non-human resources), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya. Selain bentuk-bentuk dokumen tersebut diatas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Foto dibuat dengan maksud tertentu,

misalnya untuk melukiskan kegembiraan atau kesedihan, kemeriahan, semangat dan situasi psikologis lainnya. Foto juga dapat menggambarkan situasi sosial seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan berbagai fenomena sosial lainnya. Selain foto, bahan statistik juga dapat dimanfaatkan sebagai dokumen yang mampu memberikan informasi kuantitatif, seperti jumlah guru, murid, tenaga administrasi dalam suatu lembaga atau organisasi. Data ini sangat membantu sekali bagi peneliti dalam menganalisa data, dengan dokumen-dokumen kuantitatif ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan psikis dalam memberikan jawaban kepada peneliti.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu:

a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu adanya

keaktivitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan pedoman wawancara model ini sangat tergantung pada pewawancara.

b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai cek-list. Pewawancara hanya tinggal memberi tanda v (check).

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya wawancara dilaksanakan dalam bentuk” semi structured”. Dimana interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa pihak diantaranya :

- a. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
- b. Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
- c. Kepala Bidang Kerjasama Daerah Provinsi Gorontalo

G.3 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian perpustakaan (Library Research) adalah penelitian dengan cara membaca, memperjelas literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan dalam masalah penelitian agar dapat memecahkan permasalahan dan menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data dan informasi secara lengkap yang berkaitan dengan studi kasus dalam skripsi ini.

G.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif artinya menggambarkan dan menguraikan hasil dari pengamatan dan penelitian seperti (melihat Provinsi Gorontalo dan kondisi daerah), sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan secara lahiriah dari susunan kata-kata dan kalimat yang dituangkan dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan bab yang mendeskripsikan tentang profil provinsi Gorontalo dan Southern secara umum yang dimana terkait letak geografis dan tingkat perkembangan dan kemajuan daerah dalam berbagai aspek.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang mendeskripsikan tentang program UNDP di Indonesia dan Sri Lanka baik sudah

teralisasi maupun yang masih menjadi target atau rencana kedepan.

BAB VI : Bab ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadikan provinsi Gorontalo dan Southern sebagai tempat pelaksanaan program ART Gold UNDP.

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan, berisi dari bab-bab sebelumnya. Lampiran dan Daftar Pustaka, berisi tentang data-data Buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

A. Geografis dan Administrasi Daerah

Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki enam wilayah pemerintahan yakni lima Kabupaten dan satu Kota.

Gambar 1. Peta Provinsi Gorontalo



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan topografinya, Gorontalo sebagian besar terdiri atas perbukitan maupun pegunungan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi dengan ketinggian 2.100 m. Disamping itu, provinsi ini juga banyak dilintasi sungai, dimana sungai terpanjangnya adalah Sungai Paguyaman yang di Kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo memiliki enam kabupaten/kota yaitu Kota Gorontalo, Kab. Boalemo, Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

1. Kependudukan

Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 1.062.883 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa per km². Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Gorontalo yakni sebanyak 2.791 jiwa per Km² dan yang paling rendah adalah Kabupaten Pohuwato dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 30 jiwa per Km². Dilihat dari sisi laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010). Provinsi Gorontalo sebesar 2,26 persen lebih tinggi dari pertumbuhan nasional penduduk nasional (1,49%). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi terdapat di Kabupaten Boalemo 3,62 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Gorontalo sebesar minus 1,37persen.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah km ²	Jumlah		Kepadatan Penduduk	
		Penduduk	Rumah tangga	per km ²	per Rumah Tangga
01. Boalemo	1.736,61	132.076	30.981	76	4
02. Gorontalo	2.143,48	363.763	85.328	170	4
03. Pohuwato	4.455,60	131.560	30.860	30	4
04. Bone Bolango	1.891,49	145.015	34.016	77	4
05. Gorontalo Utara	2.141,86	106.407	24.960	50	4
71. Gorontalo	65,96	184.062	43.177	2.791	4
GORONTALO	12.435,00	1.062.883	249.323	85	4

Sumber: Provinsi Dalam Angka tahun 2011

B. Keragaan Pembangunan Provinsi Gorontalo

1. Indikator Ekonomi

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari hanya sedikit daerah pemekaran dengan geliat pembangunan yang sangat dinamis. Data indikator makro memperlihatkan trend kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari sisi perkembangan sektor riil, indikator pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 8 tahun sejak pemekaran berada di atas rata-rata nasional; dengan pertumbuhan rata di atas 5%, dan/atau rata-rata di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di regio Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawesi Tenggara. Membaiknya perekonomian nasional pada selang 2 tahun terakhir, ternyata berdampak positif dalam pergerakan ekonomi Gorontalo.

Tabel 2. Indikator Makro Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2004-2008

Indikator Ekonomi	2004	2005	2006	2007	2008
PERTB EKONOMI	6,93	7,19	7,30	7,51	7,76
INFLASI	8,64	18,55	7,54	7,02	9,20
PDRB ADHB (Rp. Jutaan)	2.801,544	3.480,567	4.062,285	4.760,70	5.899,79
PDRB ADHK (Rp. Jutaan)	1.891,763	2.027,723	2.175,815	2.339,22	2.520,67
PDRB PERKAPITA ADHB	3.126.710	3.717.402	4.283.755	4.957.328	6.068.44 1
EKSPOR (Ton)	3.041.438	7.109.141	14.697.035	21.242.115	24.253. 005

Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2009

Performa ekonomi Gorontalo 2008 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi. Yang menarik adalah sumbangan sektor pertanian dan industri pengolahan yang semakin mengecil, sementara sektor jasa pemeritahan umum semakin membesar. Penurunan sumbangan sektor pertanian pada PDRB tahun 2008 Provinsi Gorontalo disikapi Pemerintah daerah dengan serius mengingat sektor pertanian adalah sektor unggulan dan yang paling besar prosentasenya dalam memberikan sumbangan bagi perekonomian Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap merespon dengan baik sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Hal ini antara lain dilaksanakan dengan mengartikulasikan sektor hulu dan sektor hilir yang bermuara kepada penciptaan nilai tambah produk-produk pertanian oleh industri yang berskala besar maupun berskala kecil. Dalam meningkatkan daya saing pasar ekspor barang dan jasa pemerintah daerah akan

merancang diversifikasi output regional melalui pengembangan produk unggulannya berdasarkan potensi yang ada serta mempromosikan one product one district.

Kinerja perekonomian Gorontalo bertumpu pada sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan. (UNDP, 2009)

a. Sektor pertanian

Sektor pertanian didukung dengan luas lahan 419,183 ha terdiri atas lahan kering seluas 390,929 ha dan lahan basah seluas 28,254 ha. Sektor ini menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu 57% dari total tenaga kerja Gorontalo. Pertumbuhan sektor pertanian Gorontalo triwulan I tahun 2007 meningkat 21,49 persen terhadap triwulan IV tahun 2006 dan meningkat tajam tahun 2008. Pertumbuhan sektor pertanian didukung oleh potensi lahan pertanian di daerah ini.

Kinerja pertanian Provinsi Gorontalo didominasi produksi dan produktivitas komoditi jagung yang terus meningkat. Produksi Untuk Jagung, berdasarkan Angka Ramalan III tahun 2008 diperkirakan mencapai 752.727 ton pipilan kering, atau naik

sebesar 179.942 ton (23,91 persen) dibandingkan produksi tahun 2007 (572.785 ton). Kenaikan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen sekitar 9.912 hektar (9,03 persen) dan produktivitas sebesar 12,95 kuintal/hektar (34,17 persen).

b. Sektor Perikanan dan Kelautan

Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km² yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km², laut Sulawesi 3.100 km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km² serta panjang garis pantai 590 km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 320 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 270 km. Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun potensi perikanan ikutan lainnya.

Provinsi Gorontalo Potensi perikanan tangkapnya dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/thn. Dari kedua wilayah WPP perairan tersebut untuk potensi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan hanya 92.200 Ton per tahun saja, karena kedua WPP tersebut selain dimanfaatkan oleh Provinsi Gorontalo juga dikelola dan dimanfaatkan oleh provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, sebagian Papua, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan

untuk perairan umum (danau, dan sungai) potensi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan hanya 900 ton per tahun. Dari potensi tersebut capaian produksi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 itu hanya mencapai 62.921 ton atau 67,58 %. Ini berarti masih 32,42 % yang belum terkelola dengan baik. Potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan jika saja aktivitas illegal fishing yang terjadi baik di sekitar Teluk Tomini maupun di pantai utara provinsi ini bisa diberantas. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 30.870 ton pada tahun 2008 atau hanya (9,09 %).

Dilihat dari presentase produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, memang belum memperlihatkan target yang akan dicapai oleh Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan produksi perikanan sebesar 150.000 ton per tahun yang terdiri dari produksi ikan sebesar 10.000 ton dan rumput laut 50.000 ton. Target ini dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan dan pembudidaya sekitar Rp. 1,8 juta. Kalau dilihat dengan produksi perikanan pada tahun 2008, itu hanya memberikan kontribusi pendapatan nelayan dan pembudidaya berkisar Rp. 1,2 juta s/d Rp. 1,6 Juta. Ini berarti berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu pengembangan investasi/penguatan modal, penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat pada bidang ini cukup terbuka lebar untuk dikembangkan.

2. Indikator Sosial Budaya

a. Sektor Pendidikan

Berdasarkan data Susenas, Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Gorontalo di tahun 2007 telah mencapai 95,8%. Sehingga dapat dikatakan dari setiap 100 penduduk di Provinsi Gorontalo yang berumur 10 tahun ke atas, terdapat 4 orang lagi yang tidak dapat membaca dan menulis. AMH di Kota Gorontalo merupakan angka tertinggi (99,5%), sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai AMH terendah (93,6%). Dari tahun ke tahun mereka yang tidak sekolah/tidak menamatkan pendidikan SD semakin berkurang, tahun 2001 sebesar 44,82 %, tahun 2002 sebesar 41,33 %, pada tahun 2006 sebesar 39,03 persen, selanjutnya pada tahun 2007 ini berkurang tinggal 37,57 persen.

Sebagai daerah kota yang berkaitan erat dengan tersedianya fasilitas pendidikan, persentase penduduk Kota Gorontalo yang menamatkan pendidikan yang lebih tinggi di atas Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Sedangkan persentase penduduk yang tamat perguruan tinggi di Kota Gorontalo hampir mencapai 10%. Sebaliknya, persentase penduduk yang hanya tamat SD/MI dan Tidak Sekolah merupakan angka terendah dibandingkan Kabupaten lainnya. APK tertinggi terjadi di level SD, kemudian SLTP dan SLTA. Hal sama terjadi dengan APM, walaupun terjadi perbedaan yang nyata antara besaran APK dan APM di setiap jenjang pendidikan. Tingginya APK dan APM di level SD adalah wajar karena

adanya program wajib belajar, sehingga dapat dipastikan semua penduduk bersekolah di SD.

b. Sektor Kesehatan

Hasil Susenas 2005 menunjukkan bahwa sepertiga (31%) balita di Provinsi Gorontalo mengalami proses kelahiran atas bantuan tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lainnya). Porsi terbesar pertolongan pertama proses kelahiran masih terbanyak diberikan oleh Dukun yaitu sekitar 66,67%, sisanya ditolong oleh famili/keluarga/lainnya. Keadaan ini menandakan bahwa kepercayaan penduduk terhadap tenaga medis masih kurang dibandingkan terhadap Dukun. Umumnya ketika keadaan sudah kritis atau penolong pertama tidak mampu, barulah mencari pertolongan pada tenaga medis.

Berdasarkan hasil Susenas 2005, dari 95.398 anak berumur kurang dari 5 tahun, sekitar 5,82% diantaranya tidak pernah diberi air susu ibu (ASI). Persentase ini lebih rendah dibanding tahun 2002 yang tertinggi di Kabupaten Gorontalo, yaitu 6,09%, diikuti Kota Gorontalo (5,92%), dan Kabupaten Boalemo (5,27%). Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat pula didekati dengan data jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan total penduduk atau disebut Angka Kesakitan. Dengan demikian dapat diperkirakan persentase penduduk yang terganggu aktifitasnya karena mengalami sakit. Semakin tinggi angka tersebut, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Angka Kesakitan pada tahun 2005 mencapai sekitar 37,64%.

Tabel 3. Jumlah Desa Siaga, Poskesdes & Posyandu

Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008

NO	Kabupaten / Kota	Posyandu	Desa Siaga	Poskesdes
	Kota Gorontalo	132	29	28
	Kab. Gorontalo	415	112	103
	Kab. Boalemo	149	50	28
	Kab. Pohuwato	168	45	30
	Kab. BonBol	197	53	40
	Kab. Gorut	157	51	11
	Prov. Gorontalo	1.218	340	240

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2009

3. Prasarana dan Sarana/Infrastruktur Daerah

Kondisi infrastruktur yang ada di Provinsi Gorontalo pada tahun 2007 adalah jalan raya hanya sepanjang 930,75 km (jalan negara 616,25 km dan jalan Provinsi 314,50 km), dengan kondisi baik 761,36 Km, sedang 322,25 Km, rusak 76,68 Km dan rusak berat 171,92 Km. Selain pembangunan jalan negara dan provinsi, Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan jalan untuk mempermudah akses kegiatan agropolitan. Jalan akses agropolitan dibangun guna membuka akses sentra-sentra produksi jagung dan perikanan ke pusat-pusat pemasaran lokal. Target pembangunan jalan akses sebenarnya adalah 1.000 km, tetapi sampai saat ini yang terbangun baru sekitar 15,7 % (156,70 km).

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur perhubungan darat juga menunjukkan perkembangan yang berarti. Berbagai fasilitas pendukung telah disediakan antara lain rambu-rambu lalu lintas, traffic light, pagar pengaman jalan.

Saat ini Provinsi Gorontalo telah membangun rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.624 buah dan pagar pengaman jalan sepanjang 5.388 meter yang tersebar di enam kabupaten /kota.

Sub sektor perhubungan laut juga terus didorong untuk melayani kebutuhan masyarakat pada sektor ini. Kondisi 3 (tiga) pelabuhan yaitu Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Ferry dan Pelabuhan Angrek telah diperbaiki dan disertai dengan penambahan fasilitas. Pelabuhan Gorontalo, misalnya, telah mengalami replacement total pada tahun 2002 (untuk Dermaga II) dan pada tahun 2005 resettlement dilakukan untuk Dermaga I. Penambahan panjang dermaga Pelabuhan Angrek dilakukan pada tahun 2003, yakni sepanjang 33 meter sehingga ukuran dermaga ini telah menjadi 153 meter x 12 meter.

Infrastruktur perhubungan udara di Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup berarti. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai fasilitas bandara Djalaludin telah ditingkatkan diantaranya adalah perpanjangan run-way. Saat ini, Bandara Djalaluddin dapat didarati pesawat jenis MD-92 dan Boeing 737 seri 400. Penambahan infrastruktur beberapa tahun belakangan ini telah dilakukan, diantaranya adalah infrastruktur pendukung seperti fasilitas jalan, jembatan, pergudangan, bandara udara dan pelabuhan laut. Namun demikian untuk menjadikan Gorontalo sebagai hub dan pusat pertumbuhan ekonomi di Mandala Teluk Gorontalo/Tomini masih dibutuhkan penambahan infrastruktur yang lebih besar lagi. (UNDP, 2009).

C. Profil Provinsi Southern

Provinsi Southern adalah salah satu dari sembilan provinsi yang ada di Sri Lanka, dan merupakan divisi administrasi Negara tingkat pertama. Provinsi ini telah ada sejak abad ke-19 tetapi tidak memiliki status hukum apapun sampai 1987 ketika Amandemen ke-13 Konstitusi Sri Lanka didirikan oleh dewan provinsi.

Provinsi Ini adalah salah satu provinsi terbesar dan merupakan tempat tinggal bagi 2,5 juta orang, dan sebagai provinsi ke 3 yang paling banyak penduduknya. Provinsi ini berbatasan dengan Sabaragamuwa Province dan Uva Provinsi di sebelah Utara, Provinsi Timur di Timur Laut, Provinsi Barat di Barat Laut dan Samudra Hindia di selatan, Barat dan Timur. Ibukota Provinsi Southern adalah Galle.

Provinsi Southern adalah wilayah geografis kecil yang terdiri dari distrik Galle, Matara dan Hambantota. Sama halnya dengan Provinsi Gorontalo, sektor pertanian merupakan subsisten di provinsi ini dan merupakan sektor unggulan dalam menyumbang pendapatan ekonomi di negara Sri Lanka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa Tulang punggung ekonomi Sri Lanka adalah ekspor produk pertanian dan daerah yang menjadi basis pertanian di Sri Lanka. Sektor pertanian dan perikanan pun merupakan sumber utama pendapatan bagi sebagian besar masyarakat di daerah ini.

Tabel 4. Administrasi wilayah Provinsi Southern

Kota / kota	otoritas lokal	Distrik	Populasi (2012) ^[5]
Ambalangoda	Dewan Kota Ambalangoda	Galle	56.783
Galle	Dewan Kota Galle	Galle	101.159
Hambantota	Dewan Kota Hambantota	Hambantota	57.053
Hikkaduwa	Dewan Kota Hikkaduwa	Galle	101.382
Matara	Dewan Kota Matara	Matara	114.970
Tangalle	Dewan Kota Tangalle	Hambantota	71.920
Weligama	Dewan Kota Weligama	Matara	72.511

Sumber : en.wikipedia.org

Selain kedua sektor utama tadi sektor pariwisata adalah sektor penyumbang ekonomi yang cukup besar di negara Sri Lanka. Tempat-tempat yang menjadi destinasi bagi para turis di negara Sri Lanka banyak terdapat di provinsi Southern. Cagar alam di Yala dan Udawalawe, panorama pantai dan laut Ussangoda di Ambalantota, kota suci Kataragama, kota-kota kuno Tissamaharama, Kirindadan masih banyak lagi adalah tempat wisata yang disediakan di provinsi Southern. Pemerintah provinsi Southern hingga saat ini terus melakukan pembangunan pada visi misi yang mengandalkan sektor pertanian, pariwisata dan perikanan.

Perihal pendidikan gratis di Provinsi Southern pada khususnya dan di Sri Lanka pada umumnya telah berjalan dan sukses mendahului Indonesia. Akses pada pendidikan dan pemeliharaan di sekolah telah diidentifikasi sebagai tantangan utama yang dihadapi sistem pendidikan. Di provinsi Southern pendidikan diberikan secara gratis untuk semua kalangan. Pendidikan untuk semua kalangan di negara ini merupakan program khusus yang harus di capai oleh pemerintah di provinsi Southern.

Gambar 2. Peta Negara Sri Lanka



Sumber : newsandfeaturesonindonesia.blogspot.com

BAB III

PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA DAN SRI LANKA

A. Latar Belakang Terbentuknya UNDP

Pada mulanya, UNDP hadir untuk memenuhi tujuan dari PBB sendiri, yaitu “to achieve international co-operation in solving international problem of an economic, social, cultural, or humanitarian character” dan untuk mewujudkan “higher standard of living, full employment and conditions of economic and social progress and development”. Kedua tujuan PBB itu dicapai UNDP melalui pemberian bantuan teknis pada negara-negara berkembang demi terciptanya kesejahteraan dunia.

Dalam membantu pembangunan negara berkembang, kerja sama dalam bentuk pemberian bantuan teknis (technical aid) sangat diperlukan dan esensial perannya. Bantuan teknis tersebut dapat membantu negara berkembang untuk mencapai self-reliance dengan memfasilitasi dan mendukung investasi, pembangunan sumber daya manusia, riset dan pelatihan, dan dengan memperkuat kapabilitas nasional untuk pembangunan negara tersebut.

Bantuan teknis yang diberikan juga berfokus pada usaha perbaikan perumahan, fasilitas umum, pelayanan sosial. Kesemuanya dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan (living conditions) di negara berkembang, untuk membantu pembangunan kapasitas pembangunan nasional, serta untuk membantu

negara tersebut dalam berbagai masalah hubungan dengan kependudukan. Urgensi akan bantuan teknis bagi negara berkembang inilah yang kemudian mendorong PBB untuk mendirikan suatu badan yang berfokus pada usaha perbaikan kondisi pembangunan negara-negara berkembang.

UNDP memiliki dua macam program, program lima-tahun pembangunan, dan program intercountry. Kedua program tersebut menyediakan dan mengkoordinasikan aktivitas pembangunan di hampir setiap sektor ekonomi dan sosial termasuk di dalamnya, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, manufaktur, energi, transportasi, komunikasi, perumahan dan pembangunan gedung, perdagangan dan turisme, nutrisi, kesehatan, sanitasi, perlindungan alam, pendidikan dan pelatihan, pembangunan masyarakat, kesejahteraan sosial, perencanaan ekonomi, dan administrasi publik. Proyek-proyek UNDP bertujuan untuk membantu negara berkembang agar dapat menggunakan sumber daya alam dan sumber dayamasyarakat dengan baik, meningkatkan standar kehidupan, mempertinggi produktivitas, dan agar dapat berkontribusi pada perekonomian dunia. (Erika, 2008)

B. Tujuan United Nations Development Programme (UNDP)

Sama halnya seperti organisasi-organisasi lainnya, UNDP mempunyai tujuan untuk menjadi perantara untuk pembangunan yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan UNDP melaksanakan programnya. Adapun secara umum UNDP memiliki tiga tujuan umum yaitu :

1. Membantu PBB menjadi suatu badan dengan kekuatan besar dan kohesif dalam pembangunan umat manusia.
2. Memfokuskan pada sumber daya yang dimiliki oleh PBB dalam rangka menjalankan semua tujuan dalam pembangunan umat manusia seperti: mengurangi tingkat kemiskinan, kelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan kesetaraan gender.
3. Memperkuat kerjasama internasional dalam pembangunan manusia dan menjadi sumbu besar dalam pencapaian pembangunan manusia tersebut.(Library, 2010).

C. Program United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP dan staf kantor di atas tanah di 166 negara, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu mereka menemukan solusi untuk global dan tantangan pembangunan nasional. UNDP berfokus pada enam program pembangunan terutama :

1. Mendukung Pemerintahan Dengan Sistem Demokratis

UNDP mendukung pemerintahan demokratis nasional transisi demokratis dengan menyediakan nasihat kebijakan dan dukungan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu dalam negara, dan mendidik masyarakat tentang advokasi untuk reformasi demokrasi, mempromosikan dialog dan negosiasi, dan berbagi pengalaman sukses dari negara lain dan lokasi. UNDP juga mendukung lembaga-

lembaga demokratis yang ada dengan meningkatkan dialog, meningkatkan debat nasional, dan memfasilitasi konsensus nasional pada program-program pemerintahan.

2. Menangulangi Kemiskinan

UNDP membantu negara-negara mengembangkan strategi untuk memerangi kemiskinan oleh memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya, program-program yang menghubungkan kemiskinan dengan negara tujuan dan kebijakan yang lebih besar, dan memastikan suara yang lebih besar bagi masyarakat miskin. UNDP juga bekerja di tingkat makro untuk reformasi perdagangan, mendorong utang dan investasi asing, yang paling miskin dan memastikan masyarakat miskin mendapatkan keuntungan dari globalisasi.

Di lapangan, UNDP sponsor pembangunan proyek-proyek percontohan, mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan, dan upaya koordinat antara pemerintah, LSM, dan donor luar. Dengan cara ini, UNDP bekerja sama dengan pemimpin lokal dan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk membuat usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi. Misalnya saja Indonesia, yang memprihatinkan, kualitas manusia Indonesia benar - benar jauh lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara "terbelakang" seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109), dan Aljazair (108).

3. Pencegahan Krisis dan Pemulihan Setelah Krisis

UNDP bekerja untuk mengurangi risiko bencana atau konflik bersenjata, dan memajukan pemulihan dini setelah krisis yang terjadi. UNDP bekerja melalui kantor-kantor negara untuk mendukung pemerintah daerah dalam penilaian kebutuhan, pengembangan kapasitas, koordinasi perencanaan, dan kebijakan dan standar pengaturan.

Contoh program-program pengurangan resiko UNDP meliputi upaya untuk mengendalikan proliferasi senjata ringan, strategi untuk mengurangi dampak bencana alam, dan program untuk mendorong penggunaan diplomasi dan mencegah kekerasan. Pemulihan termasuk program-program senjata, demobilisasi dan reintegrasi dari mantan kombatan, demining usaha, program untuk reintegrate orang pengungsi, pemulihan pelayanan dasar, dan sistem keadilan transisional untuk memulihkan negara dari peperangan.

4. Menanggulangi Masalah Lingkungan dan Energi

Sebagai masyarakat miskin disproportionately dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan dan kurangnya akses kebersihan, energi terjangkau layanan, UNDP berusaha untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan ke negara-negara berkembang untuk mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan.

UNDP bekerja sama dengan negara-negara untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menangani masalah-masalah lingkungan global dengan menyediakan nasihat kebijakan inovatif dan menghubungkan mitra lingkungan sensitif melalui proyek-proyek pembangunan yang membantu masyarakat miskin membangun mata pencaharian berkelanjutan.

5. Melakukan Penanggulangan HIV / AIDS

HIV / AIDS adalah masalah besar dalam masyarakat hari ini dan UNDP bekerja untuk membantu negara-negara mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengurangi dampaknya. UNDP lingkungan berfokus pada strategi efektif air pemerintahan, akses terhadap layanan energi yang berkelanjutan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk memerangi desertification dan degradasi lahan, konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan kebijakan untuk mengendalikan emisi dari polusi dan merusak ozon depleting-benda.

Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang ke-20, ada beberapa berita yang menggembirakan. Laporan Epidemi AIDS Global yang baru dirilis tahun 2008 menunjukkan penurunan tingkat infeksi HIV di beberapa negara di seluruh dunia. Berita ini seharusnya mengobarkan harapan dan menyemangati kembali aksi-aksi kita. Tetapi, kita sepatutnya tidak berpuas diri karena laporan yang sama mencatat bahwa di beberapa negara lain tingkat infeksi masih meningkat.

Tema Kampanye Hari AIDS Se-Dunia hari ini adalah “Lead – Empower – Deliver” bertujuan untuk lebih fokus pada kebutuhan akan akses publik atas pencegahan HIV, pengobatan, perhatian dan dukungan pelayanan. Walaupun kita sudah membuat perkembangan yg substansial selama lebih dari 2 dekade ini dalam melawan stigma atas AIDS, kita harus terus berjuang sebelum kita dapat berkata dengan yakin bahwa orang yg terinfeksi HIV mendapatkan manfaat dari seluruh hak dan perlindungannya.

Bekerja bersama dengan badan-badan PBB sebagai sponsor atas program PBB gabungan untuk AIDS (UNAIDS), UNDP mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjembatani hubungan antara HIV, kemiskinan, dan pembangunan, juga persamaan gender dan hak asasi manusia. UNDP berusaha untuk mencapai ini melalui beragam cara diseluruh dunia. UNDP menyadari bahwa strategi pengurangan kemiskinan tidak akan lengkap tanpa menyinggung HIV kehilangan orang tua dan penduduk produktif tidak hanya berimbas pada keluarga mereka, tetapi juga sekolah, pemerintah, pertanian dan setor-sektor sosial lain yang produktif. (Wulansari, 2011).

D. Keberadaan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia

Di Indonesia, UNDP bekerja untuk memajukan pembangunan manusia; memerangi kemiskinan dan kesenjangan; mengkonsolidasikan pemerintahan yang demokratis, dukungan pencegahan krisis nasional dan tingkat lokal; dan pemulihan;

dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang cerdas. UNDP juga terlibat penuh dalam memerangi HIV dan AIDS dan promosi kesetaraan gender.

UNDP Indonesia didedikasikan untuk lima komitmen Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan, didukung oleh 117 negara-negara donor, termasuk Indonesia, yaitu:

1. Kepemilikan nasional
2. Keselarasan dengan prioritas nasional
3. Harmonisasi donor
4. Pengelolaan untuk hasil
5. Saling akuntabilitas.

Pekerjaan UNDP di Indonesia merupakan bagian integral dari United Nations Development Assistance Framework for Indonesia (2006-2010) dan diatur oleh Program Negara UNDP periode yang sama, ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Di Indonesia, UNDP bekerja di beberapa bidang prioritas:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Millenium Development Goals. UNDP bekerja untuk mendukung Indonesia memerangi melawan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antara kelompok dan daerah, dan membantu mencapai delapan Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015

di seluruh negeri. Dalam konteks ini, UNDP telah mengidentifikasi lima bidang kunci.

2. Pemerintahan demokratis, dukungan UNDP terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk nasihat kebijakan dan bantuan teknis, penguatan kapasitas lembaga, mempromosikan dan dialog brokering, dan terlibat dalam jaringan pengetahuan dan berbagi praktekpraktek yang baik. Tiga bidang prioritas:

a. Mempromosikan pendalaman demokrasi melalui pemilu dan memperkuat dukungan parlemen.

b. Mendukung desentralisasi dan reformasi tata pemerintahan lokal.

c. Mempromosikan akses berbasis hak asasi manusia hukum dan reformasi sektor keadilan, dengan tujuan untuk meningkatkan terhadap keadilan bagi orang miskin dan kelompok rentan.

3. Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, UNDP terlibat dalam proyek seri untuk memastikan bahwa langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pembangunan berkelanjutan. Bermitra dengan badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, UNDP bertujuan untuk terus mengintegrasikan pertimbangan lingkungan strategis dalam perumusan kebijakan dan proses perencanaan yang dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas yang efektif

untuk mendukung pelaksanaan yang memberikan dampak signifikan terhadap tanah.

Tiga kunci bidang fokus UNDP:

a. Tingkat nasional aksi adaptasi perubahan iklim, dengan fokus pada analisis, saran kebijakan dan perencanaan strategis.

b. Aksi di tingkat masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik dari lingkungan, dengan fokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui perlindungan kehutanan, meningkatkan manajemen lingkungan, dan promosi energi berkelanjutan.

c. Tabungan lapisan ozon dengan mengimplementasikan Protokol Montreal.

4. Pencegahan Krisis dan Pemulihan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Bencana alam mengancam pembangunan manusia dan merongrong pencapaian Millenium Development Goals. Konflik Sosial juga merupakan hambatan serius pembangunan. Oleh karena itu UNDP memberikan prioritas utama untuk mendukung pencegahan krisis dan upaya pemulihan di Indonesia. Tiga prioritas utama:

a. Pembangunan perdamaian melalui promosi pemerintahan lokal yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan kesempatan ekonomi.

b. Mitigasi bencana dan pengurangan risiko.

c. Pemulihan bencana, masyarakat kembali pada kaki mereka dan membangun kembali kapasitas pemerintahan daerah setelah terkena bencana. (UNDP Indonesia, 2013).

E. Inisiatif Program UNDP di Indonesia

1. Pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia

Pada tahun 2011 menandai ulang tahun ke-11 dari Deklarasi Milenium, ketika negara-negara di seluruh dunia disetujui delapan Millennium Development Goals (MDGs). Meskipun Indonesia sebagian besar on-track untuk mencapai banyak target MDGs tahun 2015 batas waktu, kemajuan terhadap MDGs tidak merata.

Kemiskinan (MDG 1) adalah tantangan di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik, hampir 30 juta orang, atau 12,36 persen, di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. daerah tertentu dari Indonesia juga lebih miskin daripada yang lain; dengan tingkat kemiskinan di daerah seperti Papua, dan Papua Barat lebih dari dua kali lipat dari rata-rata nasional

Di bidang kesehatan ibu (MDG 5), penyedia layanan kesehatan yang terampil menghadiri hampir semua kelahiran di Jakarta dibandingkan dengan kurang dari setengah di lima provinsi lain di Indonesia. Dalam hal akses ke air minum yang aman (MDG 7), Jakarta, Bali dan Jogjakarta jauh melampaui Nusa Tenggara Timur (NTT),

Papua dan Kalimantan Tengah, dengan lebih dari 70 persen orang dengan akses ke air minum yang aman di bekas, dibandingkan untuk kurang dari 30 persen di kedua.

UNDP, dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, adalah bekerja menuju pencapaian MDGs dan pengentasan kemiskinan dengan menggambar pada kekayaan pengetahuan dan jaringan yang luas dari kantor UNDP berpengalaman lainnya di seluruh dunia. UNDP berusaha untuk membangun kuat proses pembuatan kebijakan pemerintah propoor, perencanaan dan penganggaran, untuk meningkatkan pelayanan, dan untuk mempercepat pencapaian MDGs. Karena kemajuan yang tidak merata terhadap MDG prestasi dan pengurangan kemiskinan, UNDP berkonsentrasi sumber daya pada tiga daerah di Indonesia yang paling menantang dan terbelakang, termasuk Tanah Papua (Papua dan Papua Barat provinsi), Aceh, dan NTT.

- a. Membangun kerangka kelembagaan yang lebih baik untuk mengurangi kemiskinan

UNDP mengutamakan upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2015, UNDP berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintah nasional dan subnasional, dan efektivitas pemangku kepentingan utama, dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan. UNDP mengutamakan upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur.

Upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah-driven harus ditanggung oleh kebijakan yang sehat, perencanaan dan penganggaran. Jika ketiga komponen ini tidak

di tempat, upaya ini untuk mengurangi kemiskinan cenderung tidak efektif. Dengan pemikiran ini, UNDP mendukung Peraturan Presiden No 65/2011 ini dan 66/2011 tentang 'Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat' dan 'Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B)' di 2011. Kebijakan Percepatan pembangunan dan program oleh pemerintah nasional dan subnasional untuk Tanah Papua sekarang dikoordinasikan melalui satu tubuh di bawah Kantor Wakil Presiden, daripada beberapa badan pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penyatuan sumber daya.

Pada tingkat subnasional, UNDP didukung pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk Papua dan Papua Barat, untuk mulai mengintegrasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target MDG dan perencanaan pro-poor, penganggaran dan pemantauan (P3BM) alat dalam Pembangunan Jangka Menengah Rencana. rencana pembangunan sebelumnya telah dimanfaatkan pertumbuhan ekonomi sebagai metrik utama untuk mengukur kemajuan pembangunan. Dengan memberikan pemerintah daerah dengan alat yang lebih akurat untuk mengukur dan memantau tingkat kemiskinan, diharapkan bahwa mereka akan lebih siap untuk merumuskan respons kebijakan yang ditargetkan memenuhi kebutuhan pembangunan yang paling mendesak dan efektif mengurangi kemiskinan. indikator awal yang positif; di Papua Barat, kemiskinan menurun dari 34,88 persen (2010) menjadi 31,92 persen; sementara di Papua, kemiskinan menurun dari 36,80 persen (2010) menjadi 31,98 persen (2011).

Sebagai hasil dari lobi yang luas dari program pembangunan termasuk Belanda dan Selandia Baru Governments funded UNDP 'Program Pembangunan Centred Rakyat' (PCDP), pemerintah subnasional dari Papua dan Papua Barat telah meningkatkan anggaran tahunan mereka pada pendidikan dan kesehatan dari dua (2006) untuk 12,3 persen (2011). Pemerintah kabupaten termasuk Timika, Yapen dan Sarmi telah mulai mereplikasi elemen dari program PCDP dan kontrak CSO lokal sebagai penyedia layanan untuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dengan dana yang bersumber dari dalam anggaran mereka sendiri.

b. Memperluas akses ke perlindungan sosial dan layanan penting

Selama tahun 2011 ke 2015, UNDP bekerja terhadap peningkatan akses dan kualitas perlindungan sosial dan layanan penting lainnya. Di daerah terpencil dan pedesaan, pengiriman perlindungan sosial dan layanan penting lainnya untuk kelompok miskin dan rentan bahkan lebih menantang karena infrastruktur yang buruk seperti jalan, dan karena geografi Indonesia yang unik. UNDP bekerja sama dengan Badan Masyarakat Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (BPMK & KK) di Papua dan Papua Barat untuk memastikan adopsi kesehatan dan pendidikan sistem dan prosedur standar oleh OMS, dan pengawasan suara atas penyediaan layanan tersebut melalui joint-monitoring. Selama July-December 2011, CSO memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada sekitar 37.135 orang, termasuk 17.584 orang, 14.675 perempuan, 4.877 anak-anak, dan 5.068 orang tak dikenal berdasarkan jenis kelamin atau usia. Pada 2012, diproyeksikan bahwa dua persen dari populasi

Tanah Papua akan menerima pelayanan kesehatan dan pendidikan dari UNDP dan BPMK didukung OMS. Dari angka ini, sekitar 90 persen dari yang ditargetkan akan asli Papua dan Papua Barat.

2. Tata Pemerintahan demokratis

Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan sepakat bahwa pemerintahan yang baik adalah salah satu kunci untuk mencapai kemajuan yang sama dan memerangi kemiskinan. Terwujudnya masyarakat demokratis berdasarkan aturan hukum, konsolidasi institusi demokrasi dan penguatan otonomi desentralisasi dan regional, serta organisasi masyarakat sipil dan partai politik semua termasuk dalam tujuan pembangunan nasional dan Nasional 2010-2014 Rencana Pembangunan Jangka menengah. Sebagai negara demokrasi muda dan bersemangat, Indonesia telah mencapai banyak, dan terus berjuang untuk memastikan demokrasi yang menguntungkan warganya. Demokrasi di Indonesia terus berkembang dan meningkatkan, seperti dapat dilihat dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yang meningkat pada rating dari 60,4 persen menjadi 67,3 persen pada tahun 2009.

UNDP berfokus pada mendukung Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mencapai pemerintahan yang terdesentralisasi yang efektif dengan memperjelas dan memperkuat peran pemerintah provinsi, sementara secara bersamaan menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi pihak yang berwenang Membangun dukungan sukses kepada Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, UNDP juga bekerja untuk membangun kapasitas lembaga-lembaga nasional dan lokal

untuk meningkatkan akses dan pemberian keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan. Mempromosikan representasi dan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil dan perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintah adalah tujuan kunci dari UNDP

a. Desentralisasi Pemerintahan

Untuk 2011-2015 UNDP bertujuan untuk mendukung pemerintah provinsi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan mereka untuk menjalankan fungsi mereka, mencapai tujuan mereka, dan meningkatkan akuntabilitas dan responsif mereka. Penguatan kapasitas pemerintah provinsi tetap tantangan, terutama karena peran pemerintah provinsi dalam konteks desentralisasi tidak didukung dengan peraturan dan kebijakan yang jelas dan memadai, meskipun pencairan antara 30 sampai 40 persen dari anggaran nasional ke provinsi tingkat. UNDP memberikan kontribusi untuk upaya untuk meningkatkan kebijakan dan kerangka peraturan yang memperjelas dan memperkuat peran dan fungsi pemerintah provinsi dan parlemen.

Draf revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sekarang siap untuk diperiksa parlemen, dan mengamanatkan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dan memantau pembangunan daerah di tingkat kabupaten / kota. Dengan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan kota telah meningkat pada masa lalu, provinsi memiliki peran penting untuk bermain, misalnya, dalam menciptakan lebih banyak kesempatan bagi orang untuk

mendapatkan keuntungan dari pembangunan ekonomi regional, dan menyediakan akses yang lebih besar ke layanan publik.

Salah satu contoh dari pekerjaan UNDP berkaitan dengan program di Aceh dan Nias, di mana, pada tahun 2011, UNDP mendukung penguatan dan sertifikasi dari Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aceh, dan juga dibantu kedua daerah dan kabupaten untuk meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan mereka. Inisiatif ini bertujuan baik memastikan bahwa provinsi memiliki lembaga yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah.

UNDP juga telah mendukung pemerintah provinsi dalam menggunakan Laporan Pembangunan Manusia Provinsi (dan indeks terkait) sebagai alat untuk meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran. Percepatan Millennium Development Goals (MDG) di provinsi tetap didukung melalui integrasi Perencanaan Pro-Poor, Penganggaran dan Pemantauan (P3BM) alat dan MDGs ke dalam proses perencanaan daerah, yang dimiliki dan diawasi oleh provinsi dan kabupaten berwenang.

b. Pencegahan Krisis dan Pemulihan

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang rawan bencana yang paling di dunia, rentan terhadap tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 644 bencana terjadi di tahun 2010; mengklaim kehidupan 1.711 orang,

sedangkan 1.398.923 orang terluka atau dilaporkan hilang. Sebanyak 14.639 rumah yang rusak berat, sementara 2.839 rumah yang rusak sedang dan 25.030 rumah rusak ringan. mitigasi yang efektif dari dampak ekonomi dan sosial dari bencana masih menjadi tantangan. Menurut Bencana Alam Risiko Atlas (2011), dari 196 negara, Indonesia memiliki risiko ekonomi tertinggi kesembilan dari bencana alam.

Melalui Rehabilitasi berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Rekonstruksi (DR4) proyek, UNDP telah bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan Indonesia-spesifik Kebutuhan Pasca Bencana Assessment (I-PDNA) metodologi dan alat, berdasarkan kerangka PDNA global yang dikembangkan bersama oleh Bank dunia, Uni Eropa dan Development Group PBB (UNDG).

Pada tahun 2011, UNDP, dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia, bekerja untuk memastikan kebijakan dan kerangka regulasi berada di tempat untuk meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap krisis dan guncangan eksternal. UNDP juga terus memperkuat kapasitas lembaga-lembaga nasional dan subnasional, dan bahwa forum multipihak, dalam pencegahan konflik, pemulihan pascakrisis, dan pengurangan risiko. Bantuan untuk lembaga-lembaga ini dan forum sudah termasuk dukungan untuk pengembangan dan penerapan alat manajemen krisis yang tepat dan mekanisme. (UNDP Indonesia, 2013)

F. Pencapaian UNDP di Indonesia

UNDP membantu melatih lebih dari 1.000 pejabat pemerintah kabupaten, anggota parlemen lokal dan pemimpin LSM untuk menggunakan peta kemiskinan,

Scorecard MDG dan analisis anggaran pro-poor untuk perencanaan dan penganggaran mereka. Akibatnya, alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan manusia di 18 kabupaten meningkat rata-rata 17 persen. UNDP bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan mengintegrasikan model pro-miskin perencanaan, penganggaran, dan pemantauan di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sejak tahun 2006, UNDP telah memberikan dukungan penting untuk program HIV / AIDS nasional Indonesia, membantu untuk membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan menyalurkan sumber daya multi donor melalui Dana Kemitraan Indonesia. Dengan bantuan dukungan UNDP, pada tahun 2010 Komisi dinilai sebagai memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dana donor langsung. Perbaikan substansial dalam kapasitas, koordinasi dan pendanaan mulai berdampak pada negara; yaitu proporsi penduduk berusia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDS meningkat dari 2,6% pada tahun 2007 menjadi 19,8% pada tahun 2010 untuk perempuan dan 1,4% untuk 20,3% untuk laki-laki. Selain itu, tingkat kasus HIV baru per tahun menurun dari 4.969 pada 2008 menjadi 2.753 pada 2010. UNDP juga telah mendukung penerbitan kertas kebijakan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan. (UNDP Indonesia, 2013).

G. Keberadaan United Nations Development Programme (UNDP) di Sri Lanka

Berakhirnya konflik 27 tahun Sri Lanka telah membuka kemungkinan periode baru perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan. Meskipun konflik, tsunami 2004 dan dampak resesi global, negara telah mencapai status pendapatan menengah.

Dengan lahan seluas 65.610 kilometer persegi dan jumlah penduduk 20,3 juta, Sri Lanka mencapai skor 0,691 pada Indeks Pembangunan Manusia 2011, peringkat 97th dari 187 negara, yang tertinggi di Asia Selatan. nilai HDI Sri Lanka untuk 2012 adalah 0,7151 menempatkan negara dalam kategori pembangunan manusia tinggi untuk pertama kalinya dan posisi negara pada 92 dari 187 negara dan wilayah. Sri Lanka adalah posisi yang baik untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Kebijakan Pembangunan Nasional Kerangka Visi, Mahinda Chintana 2011-2016, Mengakui bahwa Sri Lanka tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja. Negara ini juga harus memastikan bahwa orang-orang yang memiliki akses yang adil untuk infrastruktur, layanan dan kesempatan ekonomi sehingga mereka dapat mengambil keuntungan penuh dari buah investasi publik dan swasta. Tujuan Pemerintah dalam Mahinda Chintana adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya Sri Lanka dan tradisi sementara mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan dengan standar hidup yang lebih baik bagi semua orang. (UNDP In Sri Lanka, 2012).

1. Latar Belakang UNDP di Sri Lanka

Sejak tahun 1967, sebagai mitra pembangunan utama di Sri Lanka, UNDP telah bekerja untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai lengan pengembangan PBB, tujuan menyeluruh UNDP adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan orang-orang.

Bekerja sama dengan Pemerintah di tingkat nasional, regional dan lokal, dan masyarakat sipil dan sektor swasta, kerja UNDP membentang di pengentasan kemiskinan, pemerintahan yang demokratis, pencegahan krisis dan pemulihan dan kelestarian lingkungan. UNDP bangga telah bekerja dengan orang-orang dari Sri Lanka selama hampir lima dekade, dan kini difokuskan untuk membantu negara mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan melalui Sasaran Global. (UNDP In Sri Lanka, 2012).

2. Program United Nations Programme (UNDP) di Sri Lanka

Mulai tahun 2013, Negara Program UNDP akan fokus pada dua bidang luas: Pemerintahan Pemberdayaan dan Inklusi Sosial, yang akan mencakup bekerja pada sosio-ekonomi pemulihan dan pembangunan, inklusi sosial, supremasi hukum dan akses terhadap keadilan, pemerintahan daerah, hak asasi manusia dan dukungan parlemen, dan Keberlanjutan Lingkungan dan Ketahanan bencana, dengan fokus pada manajemen berbasis ekosistem sumber daya alam, energi bersih, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko mitigasi dan bencana.

Dalam program baru, UNDP akan bekerja dengan pemerintah nasional dan lokal dan sektor swasta, sementara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat memungkinkan mereka untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, memantau dan mempertahankan pembangunan sosial-ekonomi. UNDP juga akan bertujuan untuk menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi hak asasi manusia dengan perhatian khusus pada kebutuhan

terpinggirkan, termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, pemuda, pekerja sektor perkebunan dan masyarakat yang terkena dampak konflik. UNDP akan terus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, membangun hubungan yang erat dengan instansi Pemerintah dan lain-lain. UNDP akan bekerja di tingkat nasional pada isu-isu kebijakan dan di tingkat lokal pada pembangunan ekonomi lokal, penguatan pemerintahan lokal dan kelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana, membangun hubungan yang erat dengan Pemerintah.

a. Pengurangan kemiskinan

Sri Lanka telah siap untuk secara signifikan mempercepat pembangunan manusia tahun-tahun mendatang, sementara memanfaatkan peluang yang muncul dan bersaing dengan tantangan yang ada. Meskipun perang tiga dekade, tahun 2004 tsunami dan dampak dari resesi global, negara telah mencapai status berpenghasilan menengah dan berada di trek untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dari mengurangi separuh kemiskinan pada tahun 2015. Namun, variasi ada di tingkat regional dan antar kelompok sosial-ekonomi yang berbeda. The Uva, Tengah dan Sabaragamuwa provinsi, khususnya, yang meliputi banyak perkebunan, masih menderita dari tingkat kemiskinan yang tinggi, kelaparan dan kekurangan gizi.

Sejalan dengan prioritas MDG nasional, dukungan UNDP di bidang pengurangan kemiskinan bertujuan mempromosikan pertumbuhan yang pro-miskin yang adil dan berkelanjutan dan mengatasi kesenjangan antar daerah, melalui penciptaan kesadaran, meningkatkan pengumpulan data dan penguatan kemampuan

perencanaan. daerah ini, banyak dukungan UNDP akan difokuskan pada dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem.

UNDP akan terus mendukung pemerintahan yang responsif, penguatan kapasitas lembaga pemerintahan daerah, seperti kabupaten dan sekretariat provinsi dan dewan provinsi sehingga mereka mampu memberikan layanan berkualitas secara efisien dan transparan dan dalam mode akuntabel itu, UNDP bekerja untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan menangani menekan masalah hak asasi manusia dari kelompok yang paling dirugikan, termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, pemuda, pekerja sektor perkebunan dan masyarakat yang terkena dampak konflik

b. Pencegahan Krisis dan Pemulihan

Mendukung masyarakat yang terkena dampak hampir tiga dekade konflik karena mereka secara bertahap bergerak dari bantuan ke pemulihan dan pembangunan adalah fokus utama dari pekerjaan kami. Dalam melakukannya, kita mendukung upaya yang bertujuan membantu pengungsi untuk kembali dengan selamat ke komunitas mereka, menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan mengatasi paling mendesak keadilan dan hak asasi manusia keprihatinan mereka. Selain itu, membantu dalam upaya untuk mengelola risiko bencana juga merupakan bagian inti dari pekerjaan kami. Dengan Sri Lanka menjadi semakin rentan terhadap bencana alam, pekerjaan UNDP termasuk mempromosikan pengurangan risiko bencana dan ketahanan.

UNDP mendukung masyarakat yang sebelumnya terkena dampak konflik untuk bermigrasi dari subsisten ke pasar mata pencaharian dan membangun hubungan antara mereka dan sektor swasta sehingga mereka dapat mengakses pasar baru dan jasa keuangan. UNDP akan terus menyatukan masyarakat yang berbeda disimpang terpisah oleh konflik, dan memberikan dukungan bagi orang-orang yang rentan untuk mendapatkan dokumentasi penting yang akan memberikan mereka akses yang lebih besar ke pengadilan. Dalam mitigasi bencana alam, UNDP akan membantu mengembangkan kapasitas nasional untuk merespon bencana dan mitigasi risiko yang mereka ajukan.

c. Lingkungan dan Energi

Isu lingkungan dan risiko bencana yang signifikan sebagai Sri Lanka bergerak maju pada lintasan pembangunan. Setiap satu dolar yang diinvestasikan dalam pengurangan risiko menyimpan empat dolar dalam menanggapi bencana. Sri Lanka adalah rumah bagi kekayaan sumber daya alam dan kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, 21 spesies amfibi dianggap punah dan 52 dianggap berada di bawah ancaman. UNDP telah membangun hubungan dekat dengan badan-badan pemerintah dan lain-lain pada isu-isu lingkungan dan akan mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Di bidang Energi, Lingkungan dan Manajemen Risiko Bencana, UNDP akan bekerja di tingkat nasional, sub-nasional dan masyarakat, dan mempromosikan kelestarian lingkungan, energi terbarukan, ketahanan iklim dan manajemen risiko

bencana. Ini akan mendukung Pemerintah untuk memenuhi kewajiban internasionalnya mengenai perlindungan lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap tiga konvensi Rio, memperkuat kerangka kelembagaan dan kebijakan untuk keberlanjutan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. juga akan membantu mempromosikan kemitraan, berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik, selatan-selatan kerjasama dan memberikan hibah dan bantuan teknis dalam mendukung upaya yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.(UNDP In Sri Lanka, 2012)

3. Pencapaian UNDP di Sri Lanka

UNDP telah terlibat dalam Sri Lanka selama lebih dari enam dekade dan karena transit ke program baru, itu dibangun di atas hasil yang dicapai sejauh ini. Sebagai buntut dari konflik, UNDP membantu masyarakat membangun kehidupan yang produktif dan membangun kembali infrastruktur skala kecil. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menjadi lebih tangguh dengan terlibat dalam perencanaan tingkat desa, membangun siklon dan banjir rumah tahan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk merespon bencana.

UNDP telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Ini mendukung upaya Pemerintah Sri Lanka untuk meningkatkan pemantauan arus bantuan (seperti yang diidentifikasi dalam agenda Paris) melalui pembentukan Sistem Terpadu Nasional Informasi Data (Indis). database memonitor berbagai indikator kinerja utama, termasuk berbagai parameter berdasarkan Manajemen

berbasis Hasil (RBM) prinsip. Database, bertempat di Departemen Keuangan, memperkuat akuntabilitas penggunaan dana dan akhirnya, pengelolaan bantuan. Sistem Indis juga memiliki kemampuan mengelola evaluasi proyek pembangunan masa lalu, yang meliputi pelajaran. Hal ini akan meningkatkan pengembangan proposal proyek. Pada tahun 2011, dengan dukungan teknis UNDP, Departemen Keuangan dan Perencanaan membuatnya wajib untuk menggunakan teknik RBM untuk memantau kinerja dan penyusunan anggaran.

Dalam mendukung struktur pemerintahan, UNDP telah membangun kapasitas lengan pusat dan dekonsentrasi dari pemerintah, serta lembaga yang dipilih secara lokal. Ini sekarang dalam posisi menguat untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, dengan menggunakan berbagai sumber informasi, dan mengadopsi praktik terbaik untuk membangun desain dan penggunaan lahan.

UNDP telah membangun hubungan dekat dengan badan-badan pemerintah dan lembaga terkait lainnya pada isu-isu lingkungan dan posisi yang baik untuk mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam meningkatkan respon terhadap bencana, UNDP telah memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat Pusat Penanggulangan Bencana Nasional. UNDP didukung lebih dari 30 instansi pemerintah yang terlibat dengan pengembangan, konservasi dan perencanaan untuk melakukan Penilaian Strategis Lingkungan

Terpadu untuk Provinsi Utara yang terkena dampak konflik, yang didirikan baseline lingkungan dan dipetakan daerah arkeologi penting dan koridor satwa liar.

UNDP menugaskan Laporan Pembangunan Manusia Nasional 2014. Diakui sebagai masukan yang bermanfaat bagi APBN untuk 2013, NHDR meneliti kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah geografis Sri Lanka dan di berbagai kelompok populasi dan menilai kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pemerintahan sektor. Ini berfungsi sebagai alat advokasi karena menempatkan sebagainya seperangkat rekomendasi kebijakan untuk membantu mengatasi kesenjangan, memungkinkan orang Sri Lanka untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kemajuan sosial-ekonomi secara keseluruhan. (UNDP In Sri Lanka, 2012)

BAB IV

ALASAN UNDP MENETAPKAN PROVINSI GORONTALO DALAM PROGRAM ART GOLD

UNDP memilih Provinsi Gorontalo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Memiliki komoditas unggulan di bidang pertanian.

Pelaksanaan program dari UNDP yang dinamakan ART Gold atau inisiatif kerjasama yang diterapkan di provinsi Gorontalo dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Gorontalo mempunyai komoditas unggulan pada sektor pertanian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program UNDP merupakan program kerjasama maka perlunya daerah yang lain untuk dijadikan partner dari provinsi Gorontalo, dan dalam hal ini UNDP memilih provinsi Southern di Srilanka, karena daerah ini juga memiliki komoditas unggulan yang sama dengan provinsi Gorontalo di bidang pertanian.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak UNDP di provinsi Gorontalo, provinsi Gorontalo dan provinsi Southern bekerjasama untuk saling melengkapi komoditas unggulannya dalam bidang pertanian. Dalam hal ini provinsi Gorontalo memiliki keunggulan dalam pengelolaan jagung sedangkan provinsi Southern unggul dalam penerapan sistem asuransi pertanian yang sudah lama diterapkan di provinsi tersebut.

Teori kerjasama internasional menjelaskan bahwa kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut provinsi Gorontalo dan provinsi Southern ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program kerjasama karena kedua daerah memiliki kepentingan atau visi yang sama tentang bagaimana membangun daerahnya dalam pengembangan komoditas yang sama dan menjadi unggulannya di bidang pertanian.

Di provinsi Gorontalo sendiri dalam mencapai target pertama dalam kriteria ekonomi yang sehat, pemerintah provinsi Gorontalo mencanangkan program Agropolitan berbasis komoditi jagung, yang dianggap nantinya menjadi lokomotif pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini juga tidak lain adalah untuk mencapai tujuan ekonomi yang hakiki yaitu menuju kepada ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam perjalanannya pembangunan pertanian melalui program agropolitan berbasis komoditi jagung telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya melebihi angka rata-rata nasional. Provinsi Gorontalo sendiri mempunyai beberapa strategi pembangunan pertanian.

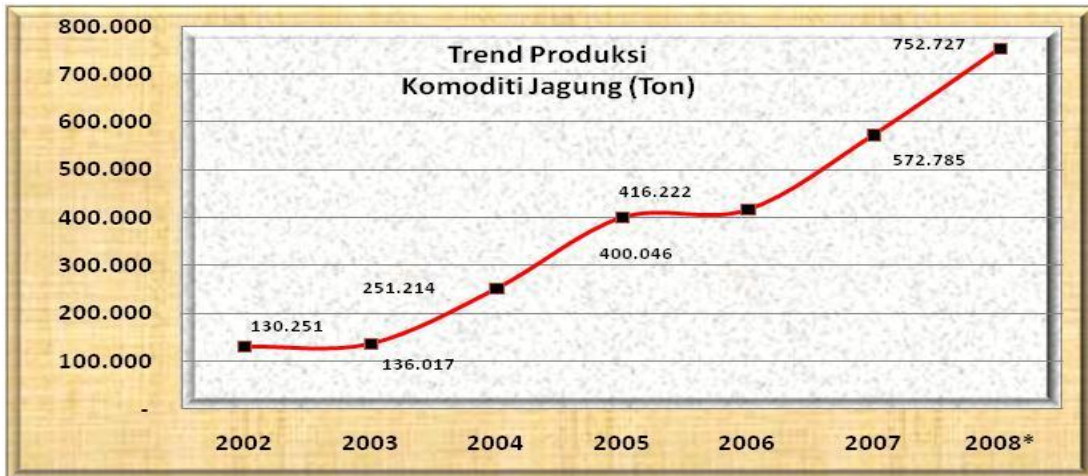
Untuk mewujudkan pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo, dikenal 9 faktor yang merupakan 9 pilar strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui program agropolitan. Ke 9 pilar ini telah dilakukan bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada, juga telah ditetapkan sebagai indikator pertanian modern yang akan dicapai.

Adapun sembilan pilar tersebut adalah sebagai berikut ;

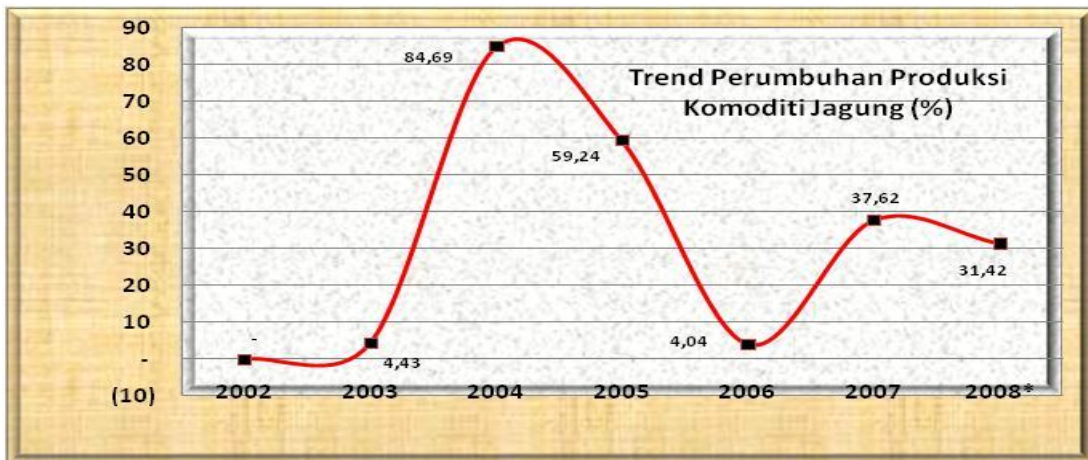
- a. Pengembangan dan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian serta Angkutan Agropolitan.
- b. Menyediaan dana penjaminan petani (APBN + APBD + ASKRINDO + Bank BRI +Bank Mandiri + Bank BNI).
- c. Penyediaan benih / bibit unggul, pupuk dan pengendalian hama penyakit.
- d. Memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMD.
- e. Pembangunan penyediaan irigasi dan Jalan Akses Agropolitan.
- f. Percontohan / Show Window disetiap Kabupaten / Kota serta Posko Agropolitan.
- g. Peningkatan SDM Pertanian.
- h. Meningkatkan peran maize center dalam penelitian pengkajian teknologi serta penerapan teknologi baru.
- i. Perencanaan dan koordinasi.

Dengan strategi diatas, hasil pembangunan pertanian khususnya angka produksi komoditi penghasil kalori utama masyarakat yaitu komoditi jagung

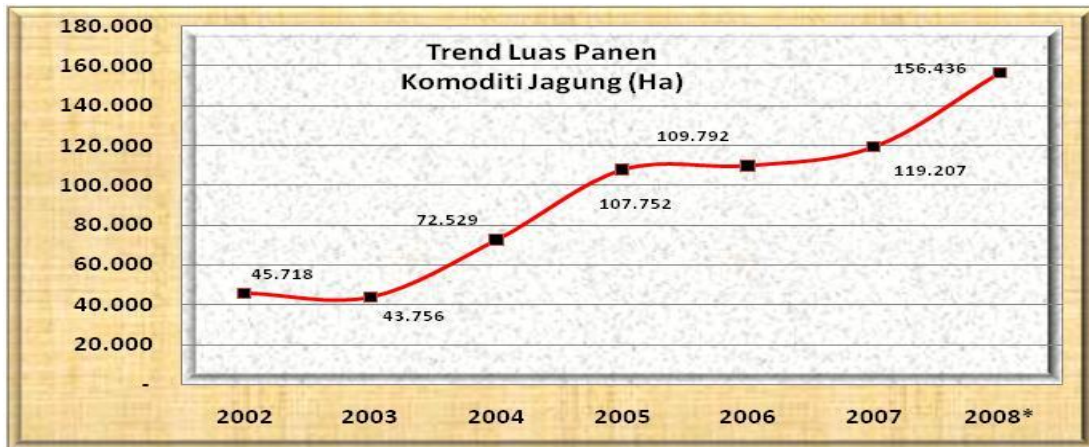
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk komoditi jagung yang dianggap sebagai lokomotif pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo dapat dilihat perkembangannya seperti pada grafik dibawah ini.



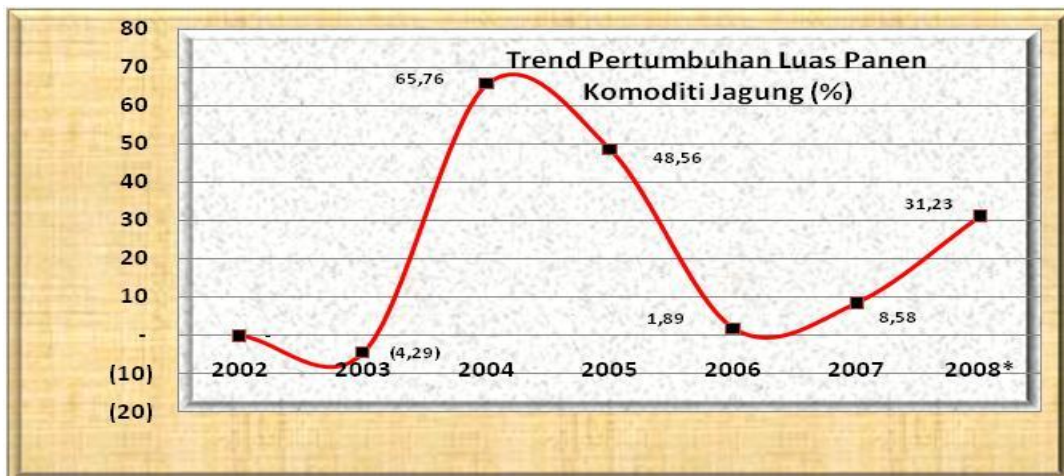
Dengan pertumbuhan produksi seperti grafik dibawah ini :



Pencapaian produksi diatas karena didukung oleh luas panen seperti pada grafik dibawah ini :



Dengan grafik pertumbuhannya sebagai berikut :



Angka-angka diatas menunjukkan bahwa target pembangunan ekonomi wilayah dengan pertanian sebagai lokomotif pembangunan wilayah, dapat dikatakan cukup fantastis. Hal ini lebih didukung oleh peningkatan ekspor dan antar pulau setiap tahun yang dilakukan oleh para pengusaha lokal daerah, dengan angka rata-rata

pertumbuhan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan angka 132 %. Berdasarkan laporan BPS pada tahun 2008, nilai devisa negara yang dihasilkan oleh ekspor komoditi yang berasal dari wilayah Gorontalo menghasilkan 24 juta US dollar, dan sumbangan komoditi jagung sebesar 65 % dari angka tersebut. Sedangkan nilai tukar petani, berdasarkan pemantauan dari pihak BPS, untuk tahun 2008, setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan tingginya pendapatan masyarakat yang lebih banyak disumbang oleh sektor pertanian. (Najamuddin, 2008).

Dari data di atas tadi tentang program pertanian provinsi Gorontalo dan pencapaian hasil dari program tersebut tentunya semua itu merupakan keunggulan yang dimiliki provinsi Gorontalo dalam bidang pertanian. Akan tetapi dalam rangka membangun dan mengembangkan daerah dari satu bidang yang menjadi unggulannya seperti pertanian perlu adanya dukungan dari pihak lain dalam ini organisasi internasional maupun provinsi yang ada di luar negeri. Melalui kerjasama internasional kepentingan yang ingin dicapai oleh provinsi Gorontalo akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

Selanjutnya ditetapkannya provinsi Southern sebagai mitra kerjasama oleh UNDP sama halnya dengan provinsi Gorontalo bahwa provinsi Southern juga memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, akan tetapi provinsi Southern lebih kepada penerapan sistem pertaniannya yaitu sistem asuransi pertanian. Pengembangan program asuransi untuk pertanian di provinsi Southern sudah dikembangkan sejak tahun 1973 yang dimulai oleh 1 komoditi yaitu padi, dan saat ini

sudah ada beberapa komoditi yang dikembangkan seperti coklat, teh, karet, tebu, jagung dan lain sebagainya. Asuransi pertanian ini menyediakan perlindungan dari kerugian seperti bencana alam sehingga dapat memberikan jaminan kepastian kepada petani dalam hal keuangan yaitu hasil panen dan semuanya itu juga dijamin oleh negara.

Asuransi pertanian ini juga berguna bagi masyarakat yang ingin mempunyai lahan, para investor, koordinator proyek, dan pemerintah. Disamping itu asuransi pertanian ini juga dapat memberikan jaminan kepada Bank ketika para petani ingin mengajukan pinjaman kredit sehingga hal ini dapat menjadi solusi ketika sulitnya para petani mendapatkan pinjaman kredit dari Bank. Di Srilanka sendiri setidaknya sudah ada 9 Asuransi yang mengembangkan Asuransi pertanian dan tergabung dalam Agricultural & Agrarian Insurance Board (AAIB).

Ada beberapa tipe dari Asuransi pertanian yang dikembangkan di Srilanka diantaranya :

- a. Asuransi tanaman
- b. Asuransi perkebunan
- c. Asuransi perikanan
- d. Asuransi hortikultural
- e. Asuransi peternakan ulet sutera
- f. Asuransi peternakan sapi, kambing, domba, dan unggas

Selain itu asuransi pertanian ini harus mencakup industri asuransi, pertanian, petani dan pemilik modal dengan mempertimbangkan bagaimana asuransi pertanian ini bisa masuk sampai ke pelosok desa dan juga dapat menghubungkannya dengan pihak perbankan, pembayaran premi yang adil dan juga penanganan klaim yang cepat. Untuk itu perlu dilakukan indentifikasi pasar, keuntungan yang dapat diperoleh para petani dan pihak asuransi dan menghitung bagaimana cash flownya.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah permintaan pasar dan bagaimana kondisi dari permintaan tersebut serta daya beli petani itu sendiri. Oeh karena itu perlu dibuat suatu sistem pembayaran dan perhitungan premi yang tepat oleh tenaga ahli. Namun jika tidak ada tenaga ahli, bisa juga berdasarkan data-data dari pemerintah khususnya dinas pertanian. Premi yang dibebankan berbeda-beda tergantung jenis tanaman, waktu tanam dan resikonya.(Satwa, 2010).

Berdasarkan alasan di atas mengapa UNDP memilih provinsi Gorontalo dan provinsi Southern untuk dijadikan tempat pelaksanaan program kerjasama karena kepentingan atau visi misi yang sama dari kedua provinsi tentang pengembangan komoditas unggulannya di bidang pertanian. Dalam mengembangkan keunggulan provinsi Gorontalo dalam pengelolaan jagung perlu di topang oleh sistem asuransi yang mengatur dan melindungi hak-hak para petani dan juga sebaliknya untuk mencapai pembangunan melalui program agropolitan berbasiskan komoditi jagung

provinsi Southern perlu mempelajari dan menerapkan sistem atau strategi pembangunan pertanian provinsi Gorontalo.

Berkaitan dengan hal ini dalam pelaksanaan kerjasama nantinya akan menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan pastinya saling menguntungkan antara kedua provinsi. UNDP pun sebagai organisasi yang membantu pencapaian pembangunan di Indonesia dan Sri Lanka melalui provinsi Gorontalo dan Southern juga akan lebih mudah untuk mencapai targetnya.

2. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terus berkembang dalam pembangunan ekonominya.

Provinsi Gorontalo tentunya merupakan provinsi yang masih berumur sangat muda dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sejak di tetapkannya provinsi Gorontalo sebagai daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000, provinsi Gorontalo terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang dan lebih ditekankan pada pembangunan ekonominya.

Dalam konsep pembangunan sendiri pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Provinsi Gorontalo meskipun berumur belum

genap 10 tahun, tetapi prestasinya jauh lebih baik daripada daerah otonom lainnya yang lebih tua. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan Provinsi Gorontalo sendiri dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia (pada 2006 sebesar 68,98 menjadi 69,79 pada 2009), pertumbuhan ekonomi (pada 2006 sebesar 7,06 % menjadi 7,63 % pada 2009), serta penurunan angka kemiskinan hingga 23,19 % pada 2010.(Riyadi, 2008).

Mewujudkan masyarakat yang kritis dan mengerti akan partisipasinya dalam pembangunan, tak bisa dilepaskan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui dalam prioritas pemerataan pembangunan di suatu daerah, kebijakan pembangunannya diadakan pada peran serta masyarakat sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan pengejawantahan dari pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Adapun pokok-pokok dan strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa dikembangkan di berbagai daerah antara lain : Pertama, penanggulangan kemiskinan, dimana perlu peran serta masyarakat dalam bentuk kemitraan yang berwawasan kebangsaan. Kedua, penajaman program yang diarahkan untuk peningkatan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Ketiga, memecahkan keterbelakangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk maju, mandiri serta sejahtera. Sasaran dari semua itu adalah ekonomi,

masyaraakat dan peningkatan pendapatan agar masyarakat miskin bias turun jumlahnya.

Dalam perjalanannya selama beberapa tahun semenjak pisah dari provinsi Sulut, pemerintah provinsi Gorontalo boleh di bilang sangat konsisten dalam masalah mengentaskan kemiskinan. Lihat saja dari data yang dikeluarkan Bappeda provinsi Gorontalo, dimana pada awalnya jumlah kemiskinan yang dimiliki oleh provinsi Gorontalo adalah sebesar 72% dari 848 ribu jumlah penduduk Gorontalo sejak pisah dari provinsi Sulut. Kini angka tersebut mulai menyusut seiring dengan majudan berkembangnya program pemerintah khususnya di sektor pertanian dengan entry point jagung serta perikanan, hingga 29%-33% saja sebagaimana data yang disampaikan oleh BPS dan BKKBN provinsi Gorontalo. (Sabar, 2006).

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari hanya sedikit daerah pemekaran dengan geliat pembangunan yang sangat dinamis. Data indikator makro memperlihatkan trend kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari sisi perkembangan sektor riil, indikator pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 8 tahun sejak pemekaran berada di atas rata-rata nasional; dengan pertumbuhan rata di atas 5%, dan/atau rata-rata di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di regio Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawesi Tenggara.

Berkaitan dengan data perkembangan daerah di atas, provinsi Gorontalo telah dapat dikatakan mampu melakukan pembangunan daerah dengan sangat baik. Provinsi Gorontalo telah mampu melakukan perubahan-perubahan besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu kriteria keberhasilan daerah atau provinsi dalam melakukan pembangunan.

Selanjutnya mengapa provinsi Gorontalo dalam program kerjasama ini disandingkan dengan provinsi Southern di Sri Lanka karena provinsi Southern sendiri cukup berhasil dalam melakukan pembangunan daerahnya. Provinsi Southern sendiri terus melakukan pembangunan pada visi misi yang mengandalkan sektor pertanian, pariwisata dan perikanan. Pendapatan Rata-Rata Provinsi di Sri Lanka provinsi Western Rs. 64,944, provinsi Central Rs. 38,558 provinsi **Southern Rs. 41,816**, provinsi Northern Rs. 37,503, provinsi Eastern Rs. 28,113, provinsi North Western Rs. 46,253, provinsi North Central Rs. 35,771, provinsi Uva Rs. 40,664 dan provinsi Sabaragamuwa Rs. 36,379. Rata-rata Nasional Rs. 41.111. (Sudewa, 2015).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan rata2 provinsi Southern menempati urutan ketiga pendapatan terbesar dan lebih tinggi dari rata2 pendapatan nasional. Hal tersebut menjadikan provinsi Southern sebagai provinsi yang tidak termasuk kategori provinsi yang miskin dinegaranya dalam artian lainnya provinsi yang pembangunan ekonominya baik.

Kemudian dalam data rasio Rasio Konsumsi Makanan di masing- masing provinsi Sri Lanka, Provinsi Western 30,6%, Provinsi Central 41,2%, Provinsi

Southern 37,8%, Provinsi Northern 44,8%, Provinsi Eastern 55,0%, Provinsi North Western 41,3%, Provinsi North Central 41,1%, Provinsi Uva 41,7% dan Provinsi Sabaragamuwa 43,2%. Rata-rata Nasional 37,6%. (Sudewa, 2015).

Data menunjukkan penduduk Provinsi Utara sebagai provinsi yang menghabiskan sekitar 55,0% dari pendapatannya untuk konsumsi makanan dan paling banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain. Hal tersebut adalah tanda dari adanya kemiskinan. Seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro (2012), bahwa suatu masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Dengan tidak adanya investasi dan tabungan maka peluang untuk terciptanya kesejahteraan dalam suatu masyarakat akan menjadi lebih kecil. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya arus perputaran modal dalam sektor produktif. (Sudewa, 2015).

Data di atas juga menunjukkan bahwa provinsi Southern merupakan provinsi yang tergolong dalam provinsi-provinsi di Sri Lanka yang menghabiskan pendapatannya lebih sedikit yaitu sekitar 37,8% untuk konsumsi makanan. Hal tersebut dapat menarik kesimpulan bahwa provinsi Southern jauh dari katagori provinsi yang miskin dinegaranya atau telah mampu melakukan pembangunan ekonomi dengan baik.

Pembangunan disuatu daerah atau provinsi juga dapat di dukung oleh kecakapan kepemimpinan Gubernur yang sangat inovatif. Dalam hal ini peneliti menambahkan bahwa UNDP memilih provinsi Gorontalo dan provinsi Southern

dilatarbelakangi juga dengan kecapakan kepemimpinan gubernur provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi Gorontalo pada saat itu memandang perlunya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak asing baik itu pemerintah daerah yang berada di luar negeri maupun lembaga donor seperti organisasi internasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tentunya sangat diperlukan inovasi yang lebih dari kepemimpinan gubernur sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut kerjasama yang terjalin dikedua provinsi ini merupakan salah satu program pemerintah daerah yang dapat dikatakan inovatif dan cerdas. Dalam pertemuan Konvensi Internasional II mengenai Pendekatan Regional dan Lokal untuk Pembangunan (Second International Convention on a Regional and Local Approach to Development) di Tangiers-Tetouan Maroko, 12-14 Mei 2008 menjadi cikal bakal dipilihnya provinsi Gorontalo dan provinsi Southern.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dan datang dari 56 negara di Eropa, Amerika, Afrika dan Asia itu, Gubernur provinsi Gorontalo pada saat itu Fadel Muhammad menceritakan bagaimana Gorontalo menapaki pembangunan daerah sejak awal berdiri. Keberhasilan Gorontalo, ungkap Fadel, dimulai dengan komitmen menerapkan model pemerintah wirausaha (entrepreneurial government) yang diilhami oleh gerakan pembaharuan tata pemerintahan baru (NPM) yang sudah

diadopsi di negara-negara maju. "Gorontalo kemudian membuat konsep pembangunan yang fokus hanya pada tiga program unggulan (SDM, pertanian dan perikanan, sehingga sasaran dan target pembangunan lebih mudah dicapai," kata Fadel.

Fadel mengungkapkan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari inisiatif Gorontalo menjalin kerjasama dengan pihak donor internasional seperti Bank Dunia, UNDP, JICA, CIDA, dll. Kita harus membangun daerah dengan semangat kerjasama hingga ke tingkat internasional tegas Fadel. Untuk itu, Fadel menawarkan kerjasama regional dengan para pemimpin region yang hadir pada pertemuan tersebut dan mendapat respons positif dari beberapa peserta. Gubernur Southern Province di Srilanka, Kumari Balasuriya, bahkan mengundang Fadel dan rombongan ke Srilanka sekaligus dalam rangka menjajaki kerjasama diberbagai bidang pembangunan. (Polapa, 2008).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah dari berbagai negara inilah UNDP melirik provinsi Gorontalo dan provinsi Southern untuk dijadikan tempat pelaksanaan program kerjasama dengan memfasilitasi kerjasama tersebut baik itu bersifat pertemuan dan bentuk bantuan dana sebesar US\$3 juta. Keinginan yang kuat dan visi misi yang sangat pro inovasi dari kedua pemerintah provinsi yang mendorong UNDP untuk memilih provinsi Gorontalo dan Southern di Sri Lanka dijadikan tempat pelaksanaan program kerjasama.

Gubernur Provinsi Gorontalo pada saat itu Fadel Muhammad telah mampu membawa provinsi Gorontalo yang pada saat itu masih berumur sangat muda sejajar dengan provinsi yang telah lebih awal melakukan pembangunan. Salah satu program pembangunan yang diterapkan Fadel Muhammad yaitu pengembangan pertanian (agropolitan) dengan komoditas jagung sebagai entry point, dimana telah mendapat pengakuan nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden SBY dan Presiden Gambia ke Gorontalo. Bukan Cuma itu, dengan keberhasilan tersebut gubernur Gorontalo dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Jagung Nasional (DJN).

Perkembangan di bidang ini dibuktikan dengan ekspor jagung tahun 2001 sebanyak 6.300 ton, tahun 2002 naik menjadi 5.700 ton. Kemudian pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 18,95 ton. Berikutnya tahun 2004 menjadi 12.310 ton. Dan untuk tahun 2005 melonjak lagi menjadi 35.960 ton. Prestasi ini tentunya merupakan dampak dari kepemimpinan Gubernur yang sangat inovatif dan produktif.

Di tingkat regional pengakuan masyarakat Sulawesi kepada Fadel Muhammad juga cukup apresiatif dengan dipercayanya menjadi Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) serta Wakil Ketua sekaligus juru bicara (jubir) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Nah, dengan keberhasilan tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah berhasil menggelar event-event seperti seminar yang pertama kali digelar di Gorontalo, yakni Workshop

of Maize Gorontalo yang bertujuan untuk mempromosikan partnership in development yang dihadiri berbagai kalangan luar negeri. Selanjutnya dalam pengembangan bidang perikanan dan kelautan pada tahun 2006 provinsi Gorontalo sudah dapat langsung mengekspor produksi ikannya ke luar negeri dengan pesawat cargo. (Sabar, 2006).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Organisasi internasional yang dalam hal ini adalah UNDP memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan Sri Lanka. Program Art Gold UNDP yang diterapkan di Provinsi Gorontalo yang merupakan representasi negara Indonesia dan Southern Province di Sri Lanka merupakan wujud nyata dari peran UNDP dalam peningkatan kesejahteraan di kedua negara.

Program kerjasama Internasional atau ART Gold UNDP di terapkan di Provinsi Gorontalo dan di latarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya :

Pertama, Provinsi Gorontalo mempunyai komoditas unggulan di bidang pertanian serta visi misi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Provinsi Gorontalo unggul dalam program agropolitan berbasis komoditi jagung dan sandingkan oeh UNDP dengan Provinsi Southern yang sama unggulnya dibidang pertanian. Provinsi Southern sangat unggul dalam sistem asuransi pertanian yang dengan sistem ini hak-hak dari para petani terlindungi. Berdasarkan keunggulan dari masing-masing provinsi ini apabila kedua provinsi saling menerapkan sistem

tersebut satu sama lain, maka yang menjadi program unggulan atau visi misi pembangunan kedua provinsi dalam bidang pertanian akan dengan sangat mudah di capai.

Kedua provinsi tentunya harus saling melengkapi dan berbagi informasi dalam sistem unggulannya tersebut. Dalam kerjasama internasional pun di jelaskan perlu adanya integrasi dan harmonisasi dari kedua negara atau daerah yang ingin bekerjasama. Integrasi dan harmonisasi ini tentunya diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan kedua provinsi yang pada dasarnya sama yaitu pada bidang pertanian.

Kedua, dipilihnya provinsi Gorontalo dilatarbelakangi oleh pembangunan provinsi Gorontalo yang dapat dikatakan cukup maju. Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi yang baru berumur 15 tahun telah mampu melakukan pembangunan yang tidak kalah dengan provinsi lainnya yang sudah lama berdiri di Indonesia. Dalam kurun waktu 8 tahun setelah pemekaran provinsi Gorontalo telah mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 23,19 %, hal tersebut merupakan perubahan yang besar bagi provinsi yang baru dalam peningkatan pembangunannya.

Selanjutnya provinsi Southern sendiri di Sri Lanka yang dijadikan partner kerjasama oleh UNDP merupakan provinsi yang terus memperlihatkan kemajuan pembangunannya di segala bidang utamanya ekonomi. Di Negara Sri Lanka sendiri apabila di lihat secara umum negara ini merupakan salah satu negara yang

belum terlalu berkembang akan tetapi salah satu provinsi di negara ini yaitu Southern Provinsi selalu memberikan kontribusi pendapatan ekonomi buat negara Sri Lanka dan terus menopang ekonomi di Sri Lanka. Apabila kita melihat data yang ada di atas pendapatan ekonomi provinsi Southern kurang lebih sama dengan rata-rata pendapatan ekonomi negara Sri Lanka. Sumbangi pendapatan ekonomi terbesar untuk Sri Lanka dari provinsi Southern datang dari pendapatan daerah dalam bidang pertanian dan pariwisata.

Berdasarkan faktor-faktor tersebutlah mengapa UNDP memilih kedua provinsi untuk dijadikan sebagai daerah tempat pelaksanaan program kerjasama internasional atau ART Gold pada tahun 2009 hingga 2013. Program yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Southern.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis berharap dapat menginspirasi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kembali program yang diterapkan di Provinsi Gorontalo oleh UNDP.

Adapaun yang manjadi saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Southern harus mampu meninjau kembali atau melakukan evaluasi dalam melihat peluang dan manfaat dari

program kerjasama Internasional yang sudah dilaksanakan ini untuk kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam kerjasama internasional dengan pihak yang lain.

2. Kecakapan dari seorang pemimpin daerah dalam hal ini Gubernur kedua provinsi khususnya Gorontalo yang pro inovasi sangat diperlukan untuk selalu membuka pintu kerjasama Internasional dengan pihak yang lain dalam rangka peningkatan pembangunan di kedua daerah.
3. Tidak adanya ketergantungan yang berlebih kepada pihak donor seperti UNDP dalam kerjasama dengan pihak asing karena itulah yang merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan daerah dalam melakukan kerjasama Internasional.
4. Provinsi Gorontalo dan Southern harus mampu memperbaiki dan membanahi daerahnya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pihak atau daerah lain di luar negeri untuk dijadikan sebagai mitra kerjasama.
5. Pemerintah Gorontalo harus menindak lanjuti skripsi ini untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi program kerjasama yang telah dilakukan dengan provinsi Southern Sri Lanka.

Daftar Pustaka

- Erika. (2008). *Peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Membantu Pembangunan di Burma (1973-1989)*. Scribd. <https://www.scribd.com/doc/24674291/Peran-United-Nations-Development-Programme-UNDP-Dalam-Membantu-Pembangunan-Di-Burma-1973-1989> (Diakses pada tanggal 8 April 2016 pukul 18.35 WIB).
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- K.J Holsti. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653.
- http://www.academia.edu/6978344/_Paradigma_Teori_Konsep_Pembangunan_yang_Tepat_untuk_Indonesia. (Diakses pada tanggal 18 April pukul 21.35).
- <http://klikbbm.blogspot.co.id/2013/06/defenisi-kerjasama-internasional.html>. (Diakses pada tanggal 18 April pukul 23.15).
- <http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/06/kerjasama-internasional-dalam-hubungan.html>. (Diakses pada tanggal 18 April pukul 23.15).
- Library.(2010). *PDF undp*. library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206613011/bab2.pdf (Diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 15.20 WIB).

- Mahbub,H.(2008).*Tempo*.<http://bisnis.tempco.co/read/news/2008/09/17/056135942/us-9-juta-untukkerja-sama-selatan-selatan>. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).
- Riyadi, S. (2008). *Konsep Kerjasama Daerah Antar Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*.asian.or.id/wp-content/uploads/.../kerjasama-provinsi-slamet.pd. (Diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 16.23 WIB).
- Sabar, Asep. (2006). *Fadel Solusi Jitu Membangun Daerah*. Jakarta: CV. Arena Seni.
- Satwa, Y. P. (2010). *Dasar Penyusunan Program Asuransi Pertanian*. ysatwa.blogspot:<http://ysatwa.blogspot.co.id/2010/12/dasar-penyusunan-program-asuransi.html> (Diakses pada tanggal 9 April 2016).
- Sorensen, R. J. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudewa, I. P. (2015). *Peran United Development Programme (UNDP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Etnis Tamil Di Sri Lanka*.<http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15918>. (Diakses pada tanggal 14 April 2016 pukul 01.00 WIB).
- UNDP.(2009).*ISSUU*.https://issuu.com/artpublications/docs/provincial_dev_guidelines_gorontalo_-_indonesian. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

UNDP. (2013). UNDP Indonesia: <http://www.id.undp.org/>. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

UNDP In Sri Lanka. (2012). <http://www.lk.undp.org/>. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

Wulansari, R. (2011). *Ramadhani'sBlog*. <http://ramadhaniwulansari.blogspot.co.id/2011/07/undp-united-nations-development-programe.html>. (Diakses pada tanggal 21 April 2016).

Riwayat Hidup Penulis

Rezky Ramadhan Antuli, Lahir di Gorontalo 16 Agustus 1995, anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan, Ayah bernama Ir. Zainuddin Antuli, M.Si, dan Ibu bernama Arwin Kasim. Perjalanan pendidikan penulis, Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Bulila Telaga, pada Tahun 2006, melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Limboto, diselesaikan pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMA N 3 Gorontalo dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan kuliah Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil program studi Ilmu Hubungan Internasional, dan sementara kuliah di jurusan ini pada tahun 2013 penulis mengambil lagi jurusan keperawatan di kampus yang berbeda akan tetapi tidak sampai ke tahap akhir kuliah.

Mengenal dunia kampus dan dimana pada saat itu merupakan masa-masa para pemuda untuk berpikir kritis penulis pun terus mengembangkan potensi yang ada dalam beberapa organisasi, seperti penulis pernah menjadi Anggota bidang KKI dalam organisasi HPMIG (Himpunan Mahasiswa Gorontalo) cabang Yogyakarta pada periode 2013-2014 dan pada periode 2015-2016 alhamdulillah diamanahkan menjabat sebagai Ketua Umum HPMIG Yogyakarta. Penulis juga aktif dalam organisasi IKPMDI (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah) se- Nusantara dan ikut berpartisipasi dalam forum-forum ketua umum Ikatan Pelajar se-Indonesia. Dan sempat mengikuti LK 1 HMI tunas bangsa UMY.

Setelah meringkaskan skripsi Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional berjudul, Penetapan Provinsi Gorontalo sebagai tempat pelaksanaan program ART Gold UNDP pada tahun 2009-2013, dipenghujung tahun 2016, penulis berhasil melewati ujian dan menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Proses penyelesaian skripsi ini menginspirasi penulis dan membuat penulis tertarik untuk lebih memperdalam Ilmu tentang hubungan luar negeri yang sudah dan masih sementara dilakukan di Provinsi Gorontalo. Penulis berharap bisa terus mengembangkan potensi dan pengetahuan lebih mendalam tentang Ilmu Hubungan Internasional dan nantinya akan dapat digunakan di Provinsi tercinta Gorontalo.